



WAPRES AS KUNJUNGI PANGKALAN LAUT SINGAPURA

Wakil Presiden AS Kamala Harris mengunjungi Pangkalan Angkatan Laut Singapura di Singapura, Senin (23/8).

Perang Saudara Jangka Panjang Diprediksi Melanda Afghanistan

Taliban merebut kekuasaan di Afghanistan pada 15 Agustus, menyebabkan pemerintah sipil yang didukung Amerika Serikat jatuh.

KABUL(IM)- Ada kekhawatiran perlawanan terhadap gerakan Taliban dapat mengakibatkan perang saudara jangka panjang di Afghanistan. Hal ini diungkapkan Sekretaris Jenderal Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif (CSTO) Stanislav Zas. "Ada kekhawatiran bahwa kantong-kantong perlawanan yang muncul terhadap Taliban dapat menyebabkan berlangsungnya perang saudara jangka panjang dengan konsekuensi yang tidak terduga bagi keamanan, tidak hanya Afghanistan tetapi juga wilayah yang lebih besar," ujar Zas pada konferensi pers di Badan Informasi Internasional Rossiya Segodnya, Selasa (24/8).

catat bahwa tidak perlu melibatkan pasukan tambahan, termasuk dari CSTO, dalam menjaga perbatasan Tajikistan-Afghanistan. "Pasukan Tajikistan akan membutuhkan bantuan dengan peralatan teknis," ungkap dia. Dia mencatat bahwa langkah-langkah yang relevan akan diambil baik melalui CSTO dan secara bilateral. "CSTO tidak memiliki informasi mengenai pengiriman senjata dari Tajikistan ke provinsi Panjshir, Afghanistan, tempat pasukan perlawanan terhadap Taliban bermarkas," papar Zas. Sebelumnya, saluran Telegram Herat Times melaporkan, mengutip satu sumber bahwa pasukan perlawanan

mengirimkan senjata dari Tajikistan ke Panjshir. "Tidak, kami tidak memiliki informasi seperti itu," ungkap Zas dalam konferensi pers di Badan Informasi Internasional Rossiya Segodnya. Taliban merebut kekuasaan di Afghanistan pada 15 Agustus, menyebabkan pemerintah sipil yang didukung Amerika Serikat jatuh. Ini mendorong ribuan orang mencoba meninggalkan negara itu karena takut akan pembalasan dari para militan Taliban. Sejak saat itu, banyak negara mulai mengevaluasi misi diplomatik dan warganya dari Afghanistan. Sementara itu, saat ini sikap negara-negara Asia Tengah terhadap Taliban banyak yang berubah. Dimana sebelumnya banyak pemerintah negara-negara Asia Tengah yang menerapkan kebijakan untuk sekularisasi pemerintah mereka karena khawatir dengan radikalisme yang disebabkan Taliban. Tapi dalam beberapa

tahun terakhir sikap mereka ke kelompok itu cenderung melemah. "Selama bertahun-tahun pemimpin-pemimpin Asia Tengah sangat anti-Taliban karena mereka takut pada Islam radikal," kata peneliti Foreign Policy Research Institute yang berada di Bishkek, Kyrgyzstan, Niva You pada Aljazeera, Selasa (24/8). Turkmenistan yang sudah lama tidak berinteraksi dengan kehadiran Taliban di kawasan mulai memperkuat hubungan dengan kelompok tersebut. Mereka bersiap saat pasukan AS mulai mundur dari Afghanistan. Uzbekistan melakukan perubahan sikap yang mengejutkan, mereka meningkatkan hubungan dengan Taliban. Menjadikan tuan rumah bagi kelompok tersebut dan selama beberapa tahun terakhir menawarkan diri sebagai tuan rumah perundingan damai. "Mereka benar-benar melibatkan diri dengan Taliban,

dan saya pikir kami dapat katakan, dengan cukup bijaksana melindungi taruhan mereka, mereka dapat memiliki hubungan baik dengan siapa pun yang berkuasa di Kabul," kata pakar Asia Tengah di University of Pittsburgh, Jennifer Brick Murtazashvili. Sementara itu, Tajikistan tetap mengambil sikap yang keras terhadap Taliban. Mereka masih mendukung Aliansi Utara, serangkaian kelompok anti-Taliban yang menjadi instrumen AS menggulingkan kelompok tersebut pada tahun 2001. Etnis Tajik masyarakat minoritas terbesar kedua di Afghanistan. Perubahan sikapnya itu terjadi ketika Moskow dan Tiongkok mengungkapkan sikap yang lebih terbuka untuk bekerja sama dengan Taliban dibandingkan negara-negara Barat. Murtazashvili mengatakan tampaknya negara-negara Asia Tengah mengejar apa yang ia sebut 'menciptakan stabilitas dengan segala cara.' ● tom

Anak Mantan Presiden Mozambik Tersandung Korupsi Rp29 Triliun

MOZAMBIK(IM)- Putra mantan Presiden Mozambik dan 18 orang lainnya telah diadili atas skandal tuna senilai USD2 miliar atau setara dengan Rp29 triliun. Ndambi Guebuza, putra mantan Presiden Armando Guebuza, dan yang lainnya menghadapi tuduhan pemerasan, penggelapan, dan pencucian uang. Mereka belum mengomentari tuduhan tersebut. Di antara terdakwa lainnya adalah Gregorio Leao, kepala Security and Intelligence Service (SISE) di bawah Guebuza, dan Antonio do Rosario, yang menjadi ketua ketiga perusahaan tersebut. Skandal korupsi terbesar di Mozambik membuat para donor termasuk Dana Moneter Internasional (IMF) memotong dana untuk negara itu dan ekonomi pun runtuh di sana. Persidangan diadakan di tenda kanvas besar di halaman penjara dengan keamanan maksimum di pinggiran ibu kota, Maputo. Ruang sidang kota dianggap terlalu kecil untuk dihadiri oleh sejumlah pengacara, 70 saksi dan 250 pekerja media. Dalam sidang pembukaan, hakim mengatakan semua terdakwa harus hadir di pengadilan dengan seragam penjara. Skandal itu terjadi antara 2013-2014, tiga perusahaan yang baru didirikan mengambil utang sebesar USD2,2 miliar (Rp32 triliun), sebagian besar tanpa sepengetahuan atau persetujuan parlemen negara tersebut. Auditor dilaporkan menemukan USD500 juta (Rp7,2 triliun) dari uang itu hilang. Pemerintah Mozambik berdiri sebagai penjamin pinjaman, yang berarti negara akan membayar kembali jika terjadi kesalahan. Uang itu diduga digunakan untuk membeli pabrik tuna besar dan armada keamanan laut, serta untuk membiayai transaksi lain yang melibatkan perusahaan di mana negara adalah pemegang saham utama. Pada 2016, pemerintah menukar sebagian utangnya dengan obligasi konvensional

yang diterbitkan negara. Segera setelah itu, ia mengakui pinjaman skala penuh, memicu krisis ekonomi di Mozambik. Mata uang negara itu kehilangan sepertiga nilainya, inflasi melonjak dan donor asing ditarik keluar. "Hukum Mozambik mengatakan bahwa eksekutif mengambil pinjaman, itu harus memberitahu parlemen. Itu cukup jelas," terang Richard Messick, yang menulis Blog Anti-Korupsi Global, kepada program Newsday BBC. Dia mengatakan dampak skandal ini menyebabkan jutaan orang jatuh ke dalam kemiskinan dan beberapa miliar dolar 'terbuang' dari pertumbuhan ekonomi. Pinjaman tersebut dikeluarkan oleh Credit Suisse dan bank Rusia VTB kepada tiga perusahaan Mozambik: Proindicus, Ematum (Mozambique Tuna Company) dan MAM (Mozambique Asset Management). Tiga mantan bankir Credit Suisse telah mengaku bersalah atas tuduhan pencucian uang di AS atas kasus tersebut. Mozambik menggugat Credit Suisse di pengadilan London, meminta beberapa pinjaman dibatalkan dan juga mencari kompensasi. Credit Suisse telah mengeluarkan klaim balasan di pengadilan Inggris terhadap Mozambik dan sebelumnya mengatakan mantan karyawannya bertindak tanpa sepengetahuan perusahaan. Salah satu orang penting dari persidangan adalah mantan Menteri Keuangan Manuel Chang. Dia telah ditahan di Afrika Selatan sejak Desember 2018, sebagai tanggapan atas surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh pihak berwenang di Amerika Serikat (AS), atas tuduhan konspirasi untuk melakukan penipuan kawat, penipuan sekuritas, dan pencucian uang. Kantor berita Reuters melaporkan pihak berwenang Afrika Selatan baru saja setuju untuk mengekstradisi dia ke Mozambik, bukan ke AS. Namun dia menyangkal melakukan kesalahan. ● gul

Kembali Memanas, AS Mengaku Siap Berunding Kembali dengan Korut

KORUT(IM)- Utusan khusus Presiden AS Joe Biden untuk Korea Utara, Sung Kim, mengatakan, siap untuk bertemu dengan rekan-rekan sejawatnya dari Korea Utara di mana saja dan kapan saja. "Siapa, Dimana saja dan kapan saja," kata Sum Kim Selasa (24/8) Sung Kim mengatakan demikian saat ia melangsungkan diskusi dengan pejabat Korea Selatan mengenai pembicaraan nuklir yang terhenti dengan Korea Utara. Kunjungan Sung ke Seoul terjadi di tengah menurunnya harapan untuk dimulainya kembali pembicaraan dengan cepat dan ketegangan baru menyusul latihan militer AS-Korea Selatan yang sedang berlangsung. Korea Utara menggambarkan latihan itu sebagai latihan untuk invasi dan ancaman akan mengambil tindakan yang akan menyebabkan krisis keamanan bagi AS dan Korea Selatan. Setelah bertemu dengan diplomat senior Korea Selatan Noh Kyu-duk, Sung menegaskan kembali bahwa pemerintahan Biden tidak memiliki niat bermusuhan terhadap Korea Utara dan bahwa latihan bersama bersifat rutin dan defensif.

Sung dan Noh mengatakan kepada wartawan bahwa mereka membahas cara-cara yang mungkin untuk memfasilitasi diplomasi, termasuk kerja sama kemanusiaan dengan Korea Utara dalam menyediakan sumber daya antivirus, sanitasi, dan air bersih. Mereka tidak mengumumkan rencana khusus apapun. Sung juga akan bertemu dengan Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Igor Morgulov, yang sedang mengunjungi Seoul. Pembicaraan antara Amerika Serikat dan Korea Utara terhenti sejak gagalnya pertemuan puncak antara mantan Presiden Donald Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un pada 2019, setelah Amerika menolak permintaan Korea Utara untuk pelonggaran besar sanksi ekonomi sebagai imbalan pengurangan sebagian kemampuan nuklirnya. Kim sejak itu berjanji untuk meningkatkan penangkal nuklir negaranya sementara mendesak rakyatnya untuk memperjuangkan kemandirian ekonomi dalam menghadapi tekanan AS. Pemerintahnya sejauh ini menolak tawaran pemerintah Biden untuk melakukan pembicaraan, dan menuntut agar Washington menghentikan kebijakan permu-

subannya terlebih dahulu. Korea Utara telah menutup perbatasannya sejak awal pandemi, tetapi pada akhirnya akan membuka diri untuk mendapat bantuan kemanusiaan dan berdialog dengan Amerika Serikat untuk melakukan vaksinasi, kata Leif-Eric Easley, profesor kajian internasional di Ewha Womans University di Seoul. Namun itu tidak berarti bahwa Korea Utara tidak akan melangsungkan uji coba misil selama atau setelah latihan AS-Korea Selatan, kata Easley. Sementara Korea Utara belum melaporkan adanya infeksi virus corona, para ahli telah menyatakan skeptis tentang klaim negara yang mengucilkan diri itu, mengingat sistem layanan kesehatannya yang buruk dan perbatasan yang keropos dengan Tiongkok. Edwin Salvador, perwakilan Organisasi Kesehatan Dunia untuk Korea Utara, mengatakan kepada Associated Press pekan lalu bahwa Korea Utara belum menyelesaikan persyaratan teknis yang diperlukan untuk menerima vaksin di bawah program COVAX yang didukung PBB. ● ans

Iran Ekspor Bensin ke Afghanistan

TEHERAN(IM)- Iran memulai kembali ekspor bensin dan minyak gas ke Afghanistan beberapa hari lalu, menyusul permintaan dari Taliban. Hal itu disampaikan Serikat Pengekspor Produk Minyak, Gas dan Petrokimia Iran, Senin(23/8). Taliban, kelompok Muslim Sunni, merebut kekuasaan di Afghanistan pekan lalu ketika Amerika Serikat (AS) dan sekutu NATO-nya menarik pasukannya setelah perang 20 tahun. Harga bensin di Afghanistan mencapai USD900 (Rp12,9 juta) per ton pekan lalu karena banyak warga Afghanistan yang panik keluar dari kota, takut akan pembalasan dan kembalinya ke versi keras hukum Islam yang diberlakukan Taliban ketika berkuasa dua dekade lalu. Untuk mengatasi lonjakan harga, pemerintah baru Taliban meminta Iran, negara kekuatan Muslim Syiah, untuk menjaga perbatasan tetap terbuka bagi para pedagang. "Taliban mengirim

pesan ke Iran yang mengatakan 'Anda dapat melanjutkan ekspor produk minyak bumi,'" kata Hamid Hossini, anggota dewan dan juru bicara serikat pekerja Iran di Teheran kepada Reuters, yang dilansir Selasa (24/8). Hossini menambahkan bahwa beberapa pedagang Iran telah berhati-hati karena masalah keamanan. Ekspor Iran, kata Hossini, dimulai beberapa hari yang lalu, setelah Taliban memotong tarif impor bahan bakar dari Iran hingga 70 persen. Pernyataan itu dia buktikan dengan menunjukkan dokumen resmi dari Badan Bea Cukai Afghanistan. Ekspor utama Iran ke Afghanistan adalah bensin dan minyak gas. Iran mengekspor sekitar 400.000 ton bahan bakar ke tetangganya itu dari Mei 2020 hingga Mei 2021. Data itu bersumber dari laporan yang diterbitkan oleh Petro-View, platform penelitian dan konsultasi minyak dan gas Iran. ● gul

1.013 Orang Tewas Sejak Kudeta Militer Myanmar

YANGON(IM)- Kelompok masyarakat sipil mencatat 1.013 orang tewas sejak militer melakukan kudeta di Myanmar pada 1 Februari hingga Selasa (24/8). Berdasarkan laporan Asosiasi Pendamping untuk Tahanan Politik (AAPP), korban tewas bertambah empat orang asal Negara Bagian Shan, Magway, dan Sagaing. Seorang guru sekolah dasar bernama Soe Lwin Lwin terparap Covid-19 saat ditahan di Penjara Taung Lay Lone (Nyaung Shwe), Negara Bagian Shan, kemudian meninggal pada 22 Agustus. Soe Lwin Lwin sebelumnya ditangkap secara sewenang-wenang oleh junta teroris, dan terlibat dalam Gerakan Pembangkangan Sipil (CDM). Pasukan junta, kata AAPP, menyerbu dan melepaskan tembakan di Desa Hinthar, Kotapraja Yesagyo, Magway, pada Minggu kemarin, setelah menerima informasi dari administrator desa yang ditunjuk junta. Berdasarkan keterangan AAPP, lima penduduk desa ditembak sebagai upaya melaku-

kan penangkapan. Salah satu warga di antaranya, Chit Ye Yint, tewas tertembak di bagian dahinya. AAPP sekaligus melaporkan pasukan junta yang sedang berpatroli di Kotapraja Khin-u, Sagaing, menembak Maung Aye dan Nweat Nweat Aye hingga tewas pada 21 Agustus. Menurut AAPP, pasangan suami istri tersebut sedang pulang ke rumah menggunakan sepeda motor setelah berjualan hasil pertanian. "Dilaporkan bahwa Maung Aye tertembak di kepala dan Nweat Nweat tertembak di perut," ungkap AAPP dalam keterangannya, Senin malam. Data AAPP menunjukkan 5.821 orang masih ditahan hingga 23 Agustus, di mana 255 di antaranya dijatuhi hukuman secara langsung. Myanmar diguncang kudeta sejak 1 Februari di mana militer menggulingkan pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi. Militer berdalih pemilu yang mengantarkan Suu Kyi terpilih dengan suara terbanyak penuh kecurangan. ● ans



PENYUNTIKAN VAKSIN KORONA DI TAIWAN

Petugas kesehatan menyuntikkan dosis vaksin penyakit virus corona (COVID-19) dari Medigen Vaccine Biologics Corp yang dikembangkan di dalam negeri di pusat vaksinasi di Taipei, Taiwan, Senin (23/8).

12 Juta Warga Irak dan Suriah Terancam Krisis Air

DAMASKUS(IM)- Lebih dari 12 juta warga di Suriah dan Irak kehilangan akses ke air, makanan, dan listrik. Kekeringan yang dipicu perubahan iklim menjadi penyebab utama terciptanya krisis tersebut. Sebanyak 13 kelompok bantuan internasional mendokumentasikan kondisi di Irak dan Suriah dalam sebuah laporan bersama yang diterbitkan pada Senin (23/8). Norwegian Refugee Council, the Danish Refugee Council, CARE, Action Against Hunger, dan Mercy Corps adalah beberapa kelompok yang turut andil dalam menyusun laporan tersebut.

kubik per detik pada Juni 2020. Menurut laporan 13 kelompok bantuan internasional, kondisi demikian membuat lebih dari lima juta warga Suriah yang bergantung pada air sungai terkena dampak langsung. Ratusan kilometer lahan pertanian terancam kekeringan total. "Tahun ini kami menyaksikan gelombang kekeringan hebat dan akibatnya, tanah kami tidak menghasilkan tanaman apa pun. Kami tidak memiliki sumber air minum, baik untuk kami maupun hewan kami," kata Abdallah, seorang pemimpin suku dari Al Sebat. Pada saat bersamaan, dua bendungan di Suriah utara yang akan segera ditutup. Maka sekitar tiga juta warga berisiko kehilangan akses listrik. Sejak penurunan ketinggian air, masyarakat di beberapa daerah seperti Hassakeh, Aleppo, Raqqad, dan Deir Az Zor, telah menyaksikan peningkatan wabah yang ditularkan melalui air seperti diare.

Mereka mengatakan, meningkatnya suhu, rekor tingkat hujan yang rendah, dan kekeringan menjadi penyebab utama warga di Irak serta Suriah kehilangan akses air untuk minum, termasuk irigasi. Suriah menghadapi kekeringan terburuk dalam 70 tahun. Minimnya sumber daya air turut mengganggu operasi pembangkit listrik. Sebab tak ada aliran air di bendungan. Pasokan listrik, termasuk untuk fasilitas vital seperti kesehatan, akhirnya terdampak. Direktur Regional Norwegian Refugee Council Carsten Hansen mengatakan, kekhawatiran total produksi air bagi jutaan warga Suriah dan Irak sudah dekat. "Dengan ratusan ribu warga Irak masih mengungsi dan lebih banyak lagi yang masih melarikan diri untuk hidup mereka di Suriah, krisis air yang berlangsung akan segera menjadi bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya dan mendorong lebih banyak pengungsi," ujar Hansen, dikutip laman Aljazeera. Menurut laporan PBB pada Juni lalu, sejak musim gugur 2020, tingkat curah hujan sangat rendah di seluruh cekungan Mediterania timur telah berkontribusi pada kondisi kekeringan di Suriah dan Irak. Krisis air diperparah dengan kian berkurangnya aliran air ke Sungai Efrat selama berbulan-bulan. Angkanya turun dari 500 meter kubik per detik pada Januari menjadi 214 meter

Kondisi Irak Sementara di Irak, sebagian besar lahan pertanian, perikanan, produksi listrik, dan sumber air minum telah habis. Setidaknya tujuh juta warga di sana terancam kehidupannya. Di Provinsi Ninewa, produksi gandum diperkirakan turun 70 persen akibat kekeringan. Direktur Regional CARE untuk Timur Tengah dan Afrika Utara, Nirvana Shawky, mengatakan krisis air di Suriah dan Irak diperparah oleh pandemi Covid-19. "Dalam jangka panjang, di luar makanan dan air darurat, mereka perlu berinvestasi dalam solusi berkelanjutan untuk krisis air," ucapnya. Direktur Regional the Danish Refugee Council untuk Timur Tengah, Gerry Garvey, memperingatkan krisis air pasti akan memburuk dan membuat kawasan itu tak stabil. "Kemungkinan akan meningkatkan konflik. Tidak ada waktu untuk disiasikan. Kita harus menemukan solusi berkelanjutan yang akan menjamin air serta makanan hari ini dan untuk generasi mendatang," ujar Garvey. ● gul



KEBAKARAN HUTAN DI CALIFORNIA - AS

Petugas pemadam kebakaran Dinas Perikanan dan Margasatwa AS Eric Schwarz, Takeshi Yamaguchi, dan Walker Woodman mencari titik api setelah kebakaran di Pollock Pines, California, AS, Senin (23/8).